

Kesiapan Provinsi Riau Menghadapi Bonus Demografi 2030: Analisis Data Proyeksi Penduduk dan Kajian Kebijakan Ketenagakerjaan serta Pendidikan

Putri Oktavia Dekasani S.

Prodi Teknik Fisika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember
putriiv2300@gmail.com

Received: 25/11/2026; Revised: 07/06/2026; Accepted: 09/06/2026; Published: 30/06/2026

ABSTRACT

Riau Province is entering the peak of its demographic dividend period, projected for 2030–2035, characterized by a dependency ratio estimated to reach 43.9% in 2030. This study aims to (1) review the trends and projections of Riau's population structure to identify the demographic window of opportunity; (2) critically examine the characteristics of employment challenges, particularly the skill mismatch between graduates' competencies and labor market demands; and (3) assess the relevance of vocational education outcomes and propose policy recommendations based on existing literature. This study employs a systematic qualitative literature review, utilizing secondary data from BPS (Statistics Indonesia), Sakernas (National Labor Force Survey), Bappenas, and the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, supplemented by a critical review of peer-reviewed journals published between 2015 and 2024. The results indicate that although the demographic window has commenced, significant structural barriers persist: the open unemployment rate (TPT) for SMK (vocational high school) graduates has reached 13.5%, while the Horizontal Mismatch Index (HMI) for higher education graduates stands at 32.4%, resulting in an estimated annual productivity loss of IDR 729 billion. Furthermore, vocational curricula remain misaligned with labor demands in priority sectors such as information technology, logistics, and renewable energy. Consequently, this study recommends three integrated policy pillars: modernizing vocational education, implementing targeted reskilling and upskilling programs, and strengthening triple-helix collaboration among the government, industry, and educational institutions.

Keywords: Demographic Bonus, Dependency Ratio, Horizontal Mismatch Index, Labor, Vocational Education

ABSTRAK

Provinsi Riau tengah memasuki periode puncak bonus demografi yang diproyeksikan terjadi pada 2030–2035, ditandai oleh Rasio Ketergantungan yang diestimasi mencapai 43,9% pada tahun 2030. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menelaah tren dan proyeksi struktur kependudukan Riau serta mengidentifikasi *window of opportunity* bonus demografi; (2) mengkaji secara kritis karakteristik tantangan ketenagakerjaan, khususnya ketidaksesuaian kompetensi antara lulusan pendidikan dan kebutuhan pasar kerja; serta (3) menilai relevansi output pendidikan vokasi dan merumuskan rekomendasi kebijakan berdasarkan kajian literatur yang ada. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur kualitatif sistematis yang bersumber pada data sekunder dari BPS, Sakernas, Bappenas, dan Kemdikbudristek, serta kajian jurnal ilmiah terindeks terbitan 2015–2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun fase bonus demografi telah dimulai, masih terdapat hambatan struktural yang signifikan: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan SMK mencapai 13,5%, sementara *Horizontal Mismatch Index* (HMI) lulusan pendidikan tinggi sebesar 32,4%, yang menimbulkan kerugian produktivitas diperkirakan Rp 729 miliar per tahun. Kurikulum vokasi belum selaras dengan kebutuhan sektor-sektor prioritas seperti teknologi informasi, logistik, dan energi terbarukan. Penelitian ini merekomendasikan tiga pilar kebijakan terintegrasi: modernisasi pendidikan vokasi, program *reskilling* dan *upskilling* yang tertarget, serta penguatan kolaborasi triple helix antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan.

Kata Kunci: Bonus Demografi, *Horizontal Mismatch Index*, Ketenagakerjaan, Pendidikan Vokasi, Rasio Ketergantungan

PENDAHULUAN

Provinsi Riau sedang berada pada fase transisi krusial menuju puncak bonus demografi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau (2023b) menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) telah melampaui dua pertiga dari total populasi, sementara proporsi penduduk usia muda dan lansia jauh lebih kecil. Secara nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2019) memproyeksikan puncak bonus demografi Indonesia terjadi pada periode 2030–2035; Riau, sebagai provinsi dengan struktur penduduk yang relatif muda, diperkirakan mengalami tren serupa, bahkan mungkin lebih awal.

Fenomena ini bersifat paradoks: bonus demografi dapat menjadi *window of opportunity* untuk mempercepat pembangunan, tetapi juga berisiko menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang negatif apabila tidak dikelola secara optimal. Lonjakan angkatan kerja yang tidak terserap secara produktif dapat meningkatkan pengangguran dan ketidakstabilan sosial. Paradoks ini menjadi semakin kritis mengingat karakteristik struktural ekonomi Riau yang masih sangat bergantung pada sektor primer—migas dan perkebunan kelapa sawit—yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan agenda dekarbonisasi (Harahap & Aimon, 2018).

Masalah inti yang memperparah situasi ini adalah kesenjangan kualitas sumber daya manusia (SDM). Meski angka partisipasi sekolah terus meningkat, kualitas lulusan pendidikan formal belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan pasar kerja. Suryadarma dan Suryahadi (2021)

menegaskan bahwa rendahnya kualitas modal manusia merupakan hambatan utama yang dapat memperlambat laju pembangunan. Kondisi ini diperburuk oleh fenomena *skill mismatch* yang masif, khususnya dari lulusan pendidikan vokasi, yang berdampak pada penurunan produktivitas dan upah (Yonanda & Usman, 2023).

Secara teoretis, bonus demografi merupakan konsekuensi dari teori transisi demografi yang menjelaskan pergeseran dari tingkat kelahiran dan kematian tinggi ke tingkat yang rendah (Rahdiana *et al.*, 2025). Bloom dan Williamson (1998, seperti dikutip dalam Rahdiana *et al.*, 2025) selanjutnya memperkenalkan konsep *Demographic Dividend* melalui tiga jalur: jalur tenaga kerja, jalur tabungan, dan jalur modal manusia. Namun, para ahli menegaskan bahwa bonus demografi tidak otomatis berubah menjadi dividend tanpa prasyarat kebijakan yang memadai—khususnya investasi pada kualitas SDM dan penciptaan lapangan kerja produktif (Sukmatika, 2025).

Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kesiapan Provinsi Riau dalam menghadapi puncak bonus demografi pada tahun 2030, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi. Secara lebih spesifik, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menelaah tren dan proyeksi struktur kependudukan Provinsi Riau hingga tahun 2030 guna mengidentifikasi besaran dan durasi *window of opportunity* bonus demografi berdasarkan data sekunder yang tersedia.
2. Mengkaji secara kritis karakteristik tantangan ketenagakerjaan di Riau, khususnya fenomena *skill mismatch* dan ketidaksesuaian horizontal

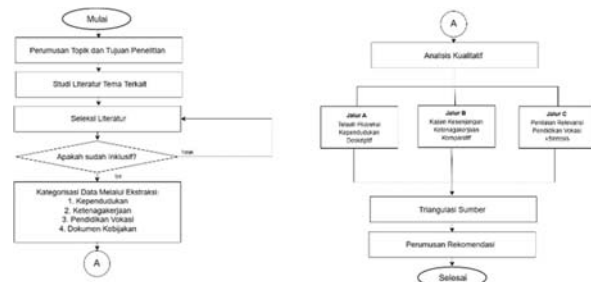
antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, berdasarkan tinjauan literatur dan data agregat Sakernas.

3. Menilai relevansi output sistem pendidikan vokasi di Riau terhadap kebutuhan kompetensi masa depan dan merumuskan rekomendasi kebijakan terintegrasi yang berbasis bukti dari kajian literatur.

Ketiga tujuan di atas dirancang selaras dengan kapabilitas metode studi literatur kualitatif yang digunakan, sehingga setiap tujuan dapat dijawab secara penuh melalui sintesis sumber-sumber sekunder yang tersedia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur kualitatif sistematis (*systematic qualitative literature review*). Pilihan metode ini didasarkan pada kesesuaiannya dengan ketiga tujuan penelitian yang bersifat deskriptif-analitis: menelaah data proyeksi kependudukan dari sumber sekunder, mengkaji karakteristik permasalahan ketenagakerjaan melalui data agregat dan literatur empiris, serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis sintesis temuan yang telah ada. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data primer maupun kalkulasi independen, melainkan menginterpretasikan dan menyintesis data serta temuan yang telah dipublikasikan oleh lembaga resmi dan jurnal ilmiah. Alur penelitian ini terdiri atas delapan tahapan sistematis yang disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Alur Studi Literatur Kualitatif Sistematis

1. Sumber data dan kriteria seleksi literatur

Sumber data yang digunakan terdiri dari empat kategori utama. Pertama, publikasi statistik resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau berupa proyeksi penduduk (2020–2023) dan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas dari Badan Pusat Statistik [BPS] Provinsi Riau (2022, 2023a, 2023b) serta proyeksi kependudukan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2019), yang menyediakan data agregat tentang struktur umur penduduk, ketenagakerjaan, dan indikator *mismatch*. Kedua, dokumen kebijakan yang mencakup RPJMD Provinsi Riau 2019–2024, *Peta Jalan Transforming Education and Training System in Indonesia* (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi [Kemdikbudristek], 2021), serta regulasi ketenagakerjaan terkait. Ketiga, jurnal ilmiah terindeks nasional dan internasional dengan topik bonus demografi, ketenagakerjaan, *skill mismatch*, dan pendidikan vokasi di Indonesia atau Riau secara khusus. Keempat, laporan riset tematik dari Direktorat Jenderal Vokasi Kemdikbudristek dan lembaga kajian terpercaya lainnya.

Seleksi terhadap literatur yang ditelusuri dilakukan berdasarkan tiga

kriteria inklusi: (1) diterbitkan antara tahun 2015 hingga 2024; (2) memiliki relevansi langsung dengan topik bonus demografi, ketenagakerjaan, *mismatch* kompetensi, atau pendidikan vokasi di Indonesia atau Riau; dan (3) berasal dari sumber yang dapat diverifikasi kredibilitasnya. Literatur yang tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut—terlalu umum, tidak relevan secara tematik, atau tidak dapat dikonfirmasi sumbernya—dieksklusi dari proses analisis.

2. Prosedur analisis

Analisis dilaksanakan melalui tiga jalur yang saling melengkapi, masing-masing sesuai dengan satu tujuan penelitian.

Jalur A: Penelaahan proyeksi kependudukan (untuk menjawab Tujuan 1). Kajian dilakukan terhadap data agregat BPS dan Bappenas tentang komposisi penduduk menurut kelompok usia produktif dan non-produktif. Data ini ditelaah secara deskriptif untuk mengidentifikasi tren perubahan proporsi penduduk antar periode proyeksi. Temuan diinterpretasikan menggunakan konsep Rasio Ketergantungan sebagai kerangka analitis, yakni perbandingan antara populasi usia non-produktif dan populasi usia produktif, untuk menentukan kapan Riau memasuki puncak *window of opportunity* demografis dan berapa lama periode tersebut berlangsung. Seluruh nilai rasio yang dianalisis bersumber dari data publikasi resmi, bukan kalkulasi mandiri peneliti.

Jalur B: Kajian kesenjangan ketenagakerjaan dan *mismatch* (untuk menjawab Tujuan 2). Kajian dilakukan terhadap data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut tingkat

pendidikan yang dipublikasikan dalam Sakernas, khususnya untuk kelompok lulusan SMK dan pendidikan tinggi. Data TPT Riau dibandingkan secara komparatif dengan rata-rata nasional untuk mengidentifikasi deviasi struktural. Selain itu, ditelaah pula konsep dan temuan *Horizontal Mismatch Index* (HMI) yang dikembangkan oleh Yonanda & Usman (2023), yaitu indeks yang mengukur proporsi lulusan pendidikan tinggi yang bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Nilai HMI yang dirujuk merupakan hasil kajian yang telah dipublikasikan, bukan kalkulasi baru. Analisis bersifat deskriptif-komparatif dan bertujuan mengidentifikasi pola serta akar penyebab ketidaksesuaian.

Jalur C: Penilaian relevansi pendidikan vokasi dan sintesis (untuk Tujuan 3). Kajian dilakukan terhadap dokumen kebijakan, laporan Kemdikbudristek, dan literatur empiris yang membahas kesesuaian kurikulum vokasi dengan kebutuhan industri. Temuan dari Jalur A dan B disintesis bersama dengan hasil Jalur C menggunakan pendekatan *narrative synthesis*, yaitu pengintegrasian pola-pola temuan dari berbagai sumber menjadi narasi analitis yang koheren. Pada tahap ini pula dirumuskan rekomendasi kebijakan dengan mengadopsi filosofi *Equally Distributed Equivalent* (EDE) *Poverty Gap Approach* dari Purwono *et al.* (2021) secara kualitatif, yang membagi rekomendasi ke dalam dua dimensi: kebijakan yang mengatasi kesenjangan rata-rata (*average gap*) dan kebijakan yang mengatasi biaya ketimpangan (*cost of inequality*).

3. Triangulasi dan validasi

Untuk meningkatkan keandalan temuan, diterapkan triangulasi sumber (*source triangulation*): setiap klaim analitis diverifikasi lintas-sumber dan hanya dijadikan dasar kesimpulan utama apabila dikonfirmasi oleh lebih dari satu sumber independen. Temuan yang hanya bersumber dari satu literatur tanpa konfirmasi ditandai sebagai temuan tentatif dan tidak dijadikan pijakan rekomendasi utama. Prinsip ini memastikan bahwa seluruh simpulan penelitian memiliki landasan empiris yang solid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proyeksi struktur kependudukan dan *window of opportunity* bonus demografi

Berdasarkan data BPS Provinsi Riau (2023) dan proyeksi komponen kohort Bappenas (2019), struktur umur penduduk Riau menunjukkan trajektori yang jelas menuju puncak bonus demografi. Tabel 1 menyajikan proyeksi proporsi penduduk menurut kelompok usia dan Rasio Ketergantungan untuk periode 2020–2040.

Tabel 1.

Proyeksi Struktur Umur Penduduk dan Rasio Ketergantungan Penduduk Provinsi Riau (2020–2040) dalam bentuk persen (%)

Tahun	Usia 0–14	Usia 15–64	Usia 65+	Rasio Ketergantungan
2020	28,5	66,8	4,7	49,7
2025	26,1	68,2	5,7	46,6
2030	24,3	69,5	6,2	43,9
2035	23	69,8	7,2	43,3
2040	22,1	68,9	9	45,2

Sumber: BPS Provinsi Riau (2023) dan proyeksi komponen kohort Bappenas (2019)

Tabel 1 menunjukkan bahwa Rasio Ketergantungan Riau diproyeksikan mencapai titik terendahnya pada periode 2030–2035, yakni sekitar 43,3–43,9%. Artinya, setiap 100 orang usia produktif hanya menanggung sekitar 43 orang usia non-produktif—kondisi yang paling menguntungkan secara demografis. *Window of opportunity* ini diproyeksikan mulai terbuka secara optimal sejak 2028 dan bertahan hingga sekitar 2040 sebelum tren penuaan mulai mendominasi. Temuan ini selaras dengan proyeksi nasional Bappenas (2019) dan mengkonfirmasi bahwa prasyarat demografis bagi dividend telah terpenuhi. Bloom dan Williamson (1998, seperti dikutip dalam Rahdiana *et al.*, 2025) menegaskan bahwa pada fase ini keuntungan demografis dapat ditransmisikan ke pertumbuhan ekonomi melalui perluasan basis tenaga kerja, peningkatan tabungan, dan investasi pada modal manusia—namun hanya apabila prasyarat kebijakan terpenuhi (Sukmatika, 2025).

2. Karakteristik tantangan ketenagakerjaan: skill mismatch dan ketidaksesuaian horizontal

Kajian terhadap data Sakernas (2022–2023) mengungkapkan bahwa tantangan ketenagakerjaan di Riau bukan sekadar kuantitas lapangan kerja, melainkan lebih dalam pada dimensi kualitas dan kesesuaian kompetensi. Tabel 2 menyajikan perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut tingkat pendidikan antara Riau dan rata-rata nasional.

Tabel 2.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan di Riau (2023) dalam persen (%)

Tingkat Pendidikan	TPT Riau	TPT Nasional
SMP ke Bawah	4,2	3,9
SMA	8,1	7,1
SMK	13,5	11,4
Diploma/Sarjana	9,8	6,9

Sumber: Sakernas 2022–2023, diolah.

Data pada Tabel 2 memperlihatkan pola yang signifikan: TPT lulusan SMK di Riau (13,5%) dan diploma/sarjana (9,8%) secara konsisten melampaui rata-rata nasional. Data tersebut menunjukkan sebuah anomali: peningkatan jenjang pendidikan vokasi justru seiring dengan tingginya tingkat pengangguran. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar kerja di Provinsi Riau belum optimal dalam menyerap tenaga kerja terdidik secara produktif.

Studi Hadisoebroto *et al.* (2022) mengkonfirmasi bahwa ketidaksesuaian kompetensi di Indonesia terjadi bahkan sebelum pencari kerja memasuki pasar kerja, mencerminkan kesenjangan struktural antara sistem pendidikan dan kebutuhan industri. Di Riau, kondisi ini diperparah oleh struktur ekonomi yang masih bertumpu pada sektor primer yang tidak banyak menyerap lulusan pendidikan tinggi secara langsung (Harahap & Aimon, 2018).

Lebih jauh, berdasarkan kajian Yonanda & Usman (2023), sekitar 32,4% lulusan diploma dan sarjana di Riau bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya—fenomena yang dikenal sebagai *horizontal mismatch*. Nilai ini berarti hampir satu dari setiap tiga lulusan pendidikan tinggi di Riau

tidak bekerja sesuai kompetensinya, yang berdampak langsung pada produktivitas. Dampak ekonomi dari kondisi ini diperkirakan mencapai kerugian Rp 729 miliar per tahun; dalam periode 2024–2028, akumulasi kerugian dapat mencapai Rp 3,645 triliun.

3. Relevansi output pendidikan vokasi dan rekomendasi kebijakan terintegrasi

. Kajian terhadap RPJMD Provinsi Riau 2019–2024 dan Peta Jalan *Transforming Education and Training System in Indonesia* (Kemdikbudristek, 2021) mengungkapkan bahwa sebagian besar program studi di SMK dan politeknik di Riau masih berfokus pada sektor primer—pertanian, perkebunan, dan migas. Sementara itu, transformasi ekonomi global dan agenda hilirisasi menuntut lebih banyak tenaga terampil di sektor teknologi informasi, logistik, manajemen rantai pasok, energi terbarukan, dan jasa berbasis digital.

Berdasarkan kajian literatur, terdapat tiga akar penyebab ketidaksesuaian ini:

- Kurikulum yang belum adaptif: kurikulum di banyak SMK dan politeknik belum diperbarui secara berkala sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan industri baru.
- Minimnya kolaborasi industri: keterlibatan dunia usaha dalam penyusunan kurikulum, magang, dan sertifikasi kompetensi masih sangat terbatas.
- Keterbatasan fasilitas dan pengajar: banyak lembaga pendidikan vokasi belum memiliki fasilitas praktik dan

tenaga pengajar yang memenuhi standar industri.

Kemitraan kuat dengan industri melalui program *teaching factory* terbukti menjadi strategi krusial dalam menghasilkan tingkat penyerapan lulusan SMK yang lebih tinggi dan cepat (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022). Temuan ini mengonfirmasi pentingnya kolaborasi triple helix (pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan).

Berdasarkan temuan dari ketiga jalur analisis, penelitian ini merumuskan rekomendasi kebijakan terintegrasi dalam dua dimensi yang diadaptasi dari filosofi *EDE Poverty Gap Approach* (Purwono *et al.*, 2021):

a) Kebijakan mengatasi kesenjangan rata-rata (*average gap*)

- Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah secara merata dengan fokus pada literasi, numerasi, dan keterampilan digital dasar—sejalan dengan temuan World Bank (2020) bahwa fondasi pendidikan dasar yang kuat merupakan prasyarat pelatihan vokasi yang efektif.
- Memodernisasi pendidikan vokasi melalui pembaruan kurikulum berbasis SKKNI terkini, peningkatan kapasitas guru/instruktur, dan penyediaan fasilitas praktik yang memadai.
- Mengintegrasikan literasi digital dan kewirausahaan dalam kurikulum sejak jenjang menengah.

b) Kebijakan mengatasi biaya ketimpangan (*cost of inequality*)

- Merancang program *reskilling* dan *upskilling* yang tertarget minimal

10.000 pekerja per tahun, dengan sasaran penurunan HMI dari 32,4% menjadi di bawah 25% pada 2030.

- Menambah kapasitas pendidikan vokasi di sektor prioritas (TI, logistik, energi terbarukan) sebesar 5.000 kursi per tahun.
- Memberikan insentif bagi industri untuk menyerap lulusan vokasi sesuai bidangnya, dengan target minimal 3.000 orang per tahun.
- Menyusun Peta Jalan SDM Terpadu 2030–2040 dengan target kuantitatif terukur: TPT lulusan SMK di bawah 8% dan HMI di bawah 25% pada tahun 2030.

Implementasi rekomendasi ini dalam kerangka kebijakan yang konsisten diharapkan mampu mentransformasi potensi demografi Riau menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengkaji kesiapan Provinsi Riau menghadapi puncak bonus demografi 2030 melalui studi literatur kualitatif sistematis yang menjawab tiga tujuan penelitian.

Pertama, data proyeksi BPS dan Bappenas mengonfirmasi bahwa Provinsi Riau akan memasuki puncak bonus demografi pada 2030–2035, dengan Rasio Ketergantungan yang diproyeksikan mencapai titik terendah sekitar 43,3–43,9%. *Window of opportunity* ini merupakan peluang demografis terbesar yang pernah dialami Riau dan diperkirakan berlangsung hingga sekitar tahun 2040.

Kedua, kajian ketenagakerjaan mengungkap hambatan struktural yang serius: TPT lulusan SMK mencapai

13,5% dan HMI lulusan pendidikan tinggi sebesar 32,4%, keduanya melampaui rata-rata nasional. Kondisi ini diestimasi menyebabkan kerugian produktivitas sebesar Rp 729 miliar per tahun, yang berisiko tinggi mengubah peluang demografi menjadi beban sosial-ekonomi.

Ketiga, penilaian relevansi pendidikan vokasi menunjukkan adanya ketidakselarasan mendasar antara ketersediaan program studi dengan kebutuhan sektor ekonomi masa depan. Ketidakselarasan ini disebabkan oleh kurikulum yang belum adaptif, minimnya kolaborasi industri, serta keterbatasan fasilitas. Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan tiga pilar kebijakan: modernisasi pendidikan vokasi, program *reskilling* dan *upskilling* yang tertarget, serta penguatan kolaborasi *triple helix*—semuanya dikemas dalam Peta Jalan SDM Terpadu 2030–2040 dengan target kuantitatif yang terukur.

Dengan demikian, bonus demografi Riau tidak akan otomatis berubah menjadi *demographic dividend* tanpa intervensi kebijakan yang tepat, terukur, dan konsisten. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian longitudinal berbasis data primer guna memantau dinamika implementasi kebijakan dan efektivitasnya secara empiris.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) atas ketersediaan dan keterbukaan akses data publik,

survei Sakernas, serta dokumen kebijakan yang menjadi landasan utama analisis dalam penelitian keliteraturan ini

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019). *Proyeksi penduduk Indonesia 2015-2045 hasil Supas 2015*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (2022). *Keadaan angkatan kerja Provinsi Riau Agustus 2022*.
<https://riau.bps.go.id/id/publication/2023/04/14/c262f948b909e5417bd6b588/keadaan-angkatan-kerja-di-provinsi-riau-agustus-2022.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (2023a). *Keadaan angkatan kerja Provinsi Riau Agustus 2023*.
<https://riau.bps.go.id/id/publication/2024/04/23/24100c2e9ab1c6184a506d0a/keadaan-angkatan-kerja-di-provinsi-riau-agustus-2023.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (2023b). *Provinsi Riau dalam angka 2023*.
<https://riau.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/5fbd2cbd170f9bf8690c5447/provinsi-riau-dalam-angka-2023.html>
- Hadisoebroto, B., Alisjahbana, A., & Suryahadi, A. (2022). Skill mismatch in the Indonesian labor market: Evidence from a field experiment. *International Journal of Manpower*, 43(5), 905–923.
<https://doi.org/10.1108/IJM-09-2021-0425>
- Harahap, A. A., & Aimon, H. (2018). Analisis pengaruh jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik*, 5(2), 141–150.
<https://doi.org/10.31629/jekp.v5i2.397>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Peta jalan transforming education and training system in Indonesia*.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Pedoman penyelenggaraan teaching factory*.
- Purwono, R., Wardana, W. W., Haryanto, T., & Mubin, M. K. (2021). Poverty dynamics in

- Indonesia: Empirical evidence from three main approaches. *World Development Perspectives*, 23, Artikel 100346. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2021.100346>
- Rahdiana, F. P., Putri, N. D. R., Agustin, R. A., Khamini, S. I., Dayatri, N. M., Nuryanto, Y., & Taryana, A. (2025). Analisis parameter demografi dalam perspektif teori transisi demografi: Studi kasus Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. *Trivikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 10(2), 1–10.
- Sukmatika, A. A. Y. (2025). Perubahan struktur demografis Indonesia: Tantangan & rekomendasi. *Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, 3(1), 27–31.
- Suryadarma, W., & Suryahadi, A. (2021). The challenges of reaping Indonesia's demographic dividend. Dalam *Indonesia Review* (Vol. 2, hlm. 19–42). Institute of Economic and Social Research, Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia. <https://doi.org/10.36352/indonesia-review.v2i1.20>
- World Bank. (2020). *The promise of education in Indonesia*.
- Yonanda, A. P., & Usman, H. (2023). Determinan status horizontal mismatch pada pekerja lulusan pendidikan tinggi di Indonesia. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 18(2), 143–168.